



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI



OLEH :

**ALI MUSA
NIM. 11775101392**

**PROGRAM STUDI S1
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2021**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mengikuti Sidang Skripsi
Strata 1 pada Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

ALI MUSA
NIM. 11775101392

**PROGRAM STUDI S1
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PERSUTUJUAN SKRIPSI

NAMA : ALI MUSA

NIM : 11775101392

FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN
STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU

DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING

Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si
NIK. 130 712 074

MENGETAHUI:

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

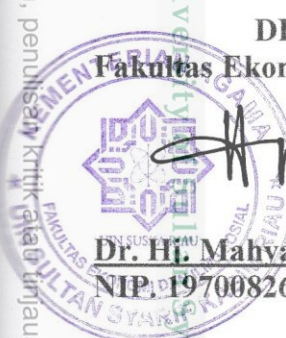
Dr. H. Mahvarni, S.E, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA JURUSAN

Program Studi Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
NIP. 19781025 200604 100 2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ALI MUSA
NIM : 11775101392
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN
STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PEKANBARU
TANGGAL UJIAN : 22 NOVEMBER 2021

Disetujui Oleh:
Ketua Penguji

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

Mengetahui:

Penguji I

Afrinaldy Rustam, S.Ip, M.Si
NIP. 19740420 201411 1 001

Penguji II

Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si
NIK. 130 712 075

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ALI MUSA
 NIM : 11775101392
 Tempat/Tgl. Lahir : KAMPUNG SELAMAT / 16 JUNI 1998
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN SOSIAL
 Prodi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

ANALISIS PELAKSIAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN
 PERUMAHAN SWADATA (BSPS) DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 8 November 2021

Yang membuat pernyataan



ALI MUSA

NIM : 11775101392

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru

Oleh:

Ali Musa

NIM.11775101392

Email: alimusa1698@gmail.com

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan banyaknya rumah tidak layak huni yang ada di Kota Pekanbaru. Tidak seluruhnya masuk kedalam lokasi perumahan dan pemukiman kumuh, Pemerintah kota Pekanbaru melaksanakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya namun demikian dalam pelaksanaannya bantuan tersebut belum berhasil sesuai targetnya, penerima bantuan belum tepat sasaran. Rumusan penelitian ini bagaimanakah pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Pekanbaru dan kendala yang terdapat dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diambil menggunakan teknik wawancara dengan key informan. Teknik analisis dilakukan dengan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan optimal dengan indikator dalam penelitian 1) Pemberdayaan Masyarakat, 2) Pengembangan Mandiri Pasca Kegiatan, indikator tersebut belum terlaksana sehingga berdampak terhadap pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dinas sudah melaksanakan kegiatan secara transparan, melibatkan masyarakat, dapat dipertanggung jawabkan, akan tetapi pengembangan mandiri pasca kegiatan belum dilaksanakan dengan optimal. Selain itu ada beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan program ini yaitu, keterbatasan swadaya masyarakat, penerima bantuan berada pada kategori lanjut usia, dan adanya program lain. Penting juga untuk memperhatikan jumlah dana, adanya keterbatasan anggaran setiap tahunnya di harapkan pemerintah dapat meningkatkan lagi anggaran untuk melaksanakan program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Program, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah Segala puji serta Syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunianya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam tidak lupa juga kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh dengan rahmat dan berkah serta ilmu pengetahuan seperti sampai saat sekarang ini.

Penulisan skripsi: **“Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru”** bertujuan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana program strata satu jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di UIN SUSKA RIAU.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan do'a dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak. Untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis sampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta Ferdinan dan Ibunda tersayang Nursaidah Nst yang telah melahirkan, membesarkan, memberikan kasih sayang dengan tulus, dukungan baik moril maupun materil, serta do'a yang tiada henti-hentinya kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Mahyarni, SE., MM. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
4. Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
5. Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
6. Mashuri, S.Ag, M.A selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif kasim Riau.
7. Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Proposal dan Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan memberi arahan yang sangat berharga hingga dan penulis selesai dalam penulisan skripsi ini.
8. Devi Deswimar, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
9. Abang saya Jamaluddin, S.T , penulis ucapkan terimakasih karena selalu memberikan dukungan berupa moril dan materil, nasehat dan motivasi demi mendukung kelancaran studi penulis dari awal kuliah hingga saat ini.
10. Adik saya Nur Hajizah dan Suci Ramadani , yang selalu memberikan dukungan dan do'a kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kepada sahabat dan teman-teman M. Taufik, Randa Syaputra , M.Jefri, M. Fakhrurrozi, Sayid Luthfiansyah, Mhd.Putra,Risanna Aulia Adha Lubis.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berkontribusi dan membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran, masukan bahkan kritikan yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi, bagi para pembaca dan semua pihak terkait. Semoga Allah selalu melindungi dimanapun kita semua berada. Aamiin ya Rabbal'alamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Desember 2021

Penulis,

ALI MUSA
NIM: 11775101392

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pelaksanaan Kebijakan	13
2.1.1 Unsur-Unsur Pelaksanaan Kebijakan.....	14
2.1.2 Prinsip Efektif Pelaksanaan Kebijakan	15
2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan.....	16
2.2 Program Bantuan Perumahan Swadaya (BSPS).....	18
2.2.1 Konsep Program Bantuan Perumahan Swadaya.....	18
2.2.2 Tujuan Program Bantuan Perumahan Swadaya.....	21
2.2.3 Keriteria Penerima Program Bantuan Perumahan Swadaya	22
2.2.4 Implementasi Program Bantuan Perumahan Swadaya	24
2.2.5 Kelompok Sasaran Program Bantuan Perumahan Swadaya	26
2.2.6 Bentuk Program Bantuan Perumahan Swadaya	27
2.3 Pemberdayaan Masyarakat	27
2.3.1 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	29
2.3.2 Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat	29

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.3 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat.....	30
2.4 Pandangan Islam Terhadap Kemiskinan	32
2.5 Definisi Konsep	34
2.6 Referensi Peraturan Perundang Undangan	36
2.7 Penelitian Terdahulu.....	37
2.8 Konsep Operasional.....	41
2.9 Kerangka Pemikiran	42
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Tempat dan Waktu	43
3.2 Jenis dan Sumber Data	43
3.3 Informan Penelitian	44
3.4 Metode Pengumpulan Data	46
3.5 Metode Analisa.....	48
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	51
4.2 Profil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru	52
4.3 Visi dan Misi	52
4.4 Tugas dan Fungsi.....	53
4.5 Potensi Pegawai	54
4.6 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.	55
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru	56
5.2 Faktor-Faktor Penghambat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.....	86



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan.....	90
6.2 Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tentang Rekapitulasi Pelaksanaan BSPS.....	4
Tabel 2.1	Konsep Operasional	41
Tabel 4.1	Potensi Pegawai.....	54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	42
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	55



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan sosial yang paling besar dan berkembang pesat di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan sudah menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari bahkan sudah menjadi masalah yang paling mendasar dan tidak mudah dalam penyelesaiannya hingga tuntas. Salah satu masalah kemiskinan yang paling pesat perkembangannya di Indonesia yaitu banyaknya masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni, lingkungan tempat tinggal yang kurang baik dan tidak sehat serta ada juga masyarakat yang sudah punya tanah namun belum mempunyai rumah. Hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi keperluan rumahnya.

Pemukiman atau rumah layak huni menjadi hal yang utama bagi kesejahteraan masyarakat. Dimana kesejahteraan merupakan keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga masyarakat tersebut mampu mengembangkan diri menjadi masyarakat yang hidup lebih baik. Rumah merupakan kebutuhan dasar setiap manusia sebagai tempat tinggal untuk bertahan hidup dan terlindung dari cuaca panas dan dingin selama jangka waktu tertentu. Namun bagi mayoritas masyarakat miskin, rumah hanya dijadikan sebagai tempat untuk berlindung tanpa memperhatikan kondisi kelayakannya. Salah satu masalah yang dihadapi masyarakat miskin di desa adalah tidak terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal yang layak huni disebabkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidakberdayaan masyarakat miskin untuk menjangkau atau memenuhi kebutuhan rumah layak huni karena kondisi ekonomi yang kurang baik. Selain itu, karena rendahnya pengetahuan untuk menghuni rumah yang layak dan sehat, sehingga kurang memperhatikan kondisi kelayakan rumah yang dihuni.

Perumahan dan pemukiman merupakan salah satu keperluan dasar manusia, yang juga mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pusat pendidikan pada keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi mendatang. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Dalam rangka pemenuhan keperluan perumahan pemerintah melakukan usaha-usaha pembangunan rumah dengan melibatkan berbagai pihak. Usaha pemerintah ini tidak terlepas dari tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Namun hak dasar tersebut saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi, salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan pemenuhan keperluan perumahan yang relatif masih besar. Hal tersebut terjadi antara lain karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memenuhi keperluan akan rumahnya.

Pemerintah terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan perumahan layak huni bagi rumah tangga miskin, yakni dengan memperluas akses layanan perumahan yang sehat dan layak huni bagi masyarakat miskin. Salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) yaitu dengan memberikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upaya untuk pengentasan rumah tidak layak huni dan meningkatkan taraf hidup agar lebih baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan fasilitasi dari pemerintah berupa bantuan stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan Perumahan swadaya merupakan rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.

Program bantuan stimulan perumahan swadaya ini sudah ada sejak tahun 2006, pada tahun 2006 program ini bernama Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP), program ini dalam naungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 8 Tahun 2006, dalam upaya pencapaian sasaran peningkatan keswadayaan masyarakat berpenghasilan rendah untuk menempati rumah dan lingkungan yang layak huni dan dalam rangka mendorong pemerintah kabupaten atau kota dalam memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memenuhi kebutuhan rumah dan lingkungan yang layak huni, pelaksanaan program tersebut melibatkan lembaga keuangan mikro/lembaga keuangan non bank (LKM/LKNN) dalam penyaluran, pencairan dan pemanfaatan stimulan program tersebut sehingga penyaluran dananya masih bersifat bergulir. Kemudian pada tahun 2011, program ini berubah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nama menjadi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) masih dalam naungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera). Pada tahun 2015, program BSPS ini berada dibawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Munculnya program bantuan stimulan perumahan swadaya merupakan lanjutan dari program bidang perumahan lainnya yang telah dibuat oleh pemerintah. Adapun yang membedakan program bantuan stimulan perumahan swadaya dengan program bidang perumahan lainnya yaitu program ini memiliki dua jenis kegiatan yaitu peningkatan kualitas bangunan serta pembangunan baru. Dimana program yang telah dijalankan pemerintah sebelumnya hanya berfokus kepada peningkatan kualitas bangunan saja. Selain itu, program bantuan stimulan perumahan swadaya juga disebabkan karena kurang meratanya penerima bantuan dari program ini.

Berikut ini merupakan besaran bantuan dari program Pelaksanaan BSPS ini dari tahun 2018 sampai tahun 2020 yang ada di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Tentang Rekapitulasi Pelaksanaan BSPS

BSPS (REGULER)						
NO	TAHUN	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH BANTUAN		
	2018	Rumbai Pesisir	Limbungan	30	450.000.000	15.000.000
			Lembah Sari	44	660.000.000	15.000.000
			Lembah Damai	60	900.000.000	15.000.000
		Tenayan Raya	Kulim	30	450.000.000	15.000.000
		Lima Puluh	Pesisir	17	255.000.000	15.000.000
			Tanjung Rhu	44		15.000.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau					660.000.000	
		Senapelan	Kampung Baru	30	450.000.000	15.000.000
		Rumbai	Rantau Panjang	27	405.000.000	15.000.000
			Muara Fajar Timur	21	315.000.000	15.000.000
JUMLAH				303	4.545.000.000	
BSPS (REGULER)						
State Islamic University of Sultan Syarif Hassan	2020	Tamoan	Sialang Mungu	20	350.000.000	17.500.000
			Air Putih	20	350.000.000	17.500.000
		Tenayan Raya	Mentangor	25	437.500.000	17.500.000
			Rejosari	20	350.000.000	17.500.000
			Bambu Kuning	20	350.000.000	17.500.000
		Payung Sekaki	Labuh Baru Timur	20	350.000.000	17.500.000
			Sungai Sibam	20	350.000.000	17.500.000
		Rumbai	Rantau Panjang	20	350.000.000	17.500.000
			Muara Fajar Barat	20	350.000.000	17.500.000
			Rumbai Bukit	20	350.000.000	17.500.000
			Palas	20	350.000.000	17.500.000
		Rumbai Pesisir	Sungai Ambang	20	350.000.000	17.500.000
			Tebing Tinggi Okura	20	350.000.000	17.500.000
			Sungai Ukai	20	350.000.000	17.500.000
		JUMLAH				285
BSPS (REGULER)						
3	2020	Tampan	Tuah Karya	14	245.000.000	17.500.000
			Air Putih	15	262.500.000	17.500.000
		Tenayan Raya	Bencah Lesung	15	262.500.000	17.500.000
			Industri Tenayan	15	262.500.000	17.500.000
			Tuah Negeri	15	262.500.000	17.500.000
			Sialang Sakti	15	262.500.000	17.500.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

JUMLAH				89	1.557.500.000	
Hak cipta mik UIN Su	BSPS (STRATEGIS)					
	2020	Rumbai	Agrowisata	22	385.000.000	17.500.000
		Marpoyan Damai	Maharatu	20	350.000.000	17.500.000
			Sidomulyo Timur	20	350.000.000	17.500.000
			Tangerang Barat	18	315.000.000	17.500.000
			Tangerang Tengah	20	350.000.000	17.500.000
	JUMLAH			100	1.750.000.000	

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

Berdasarkan data diatas dapat lihat bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2019 bantuan tersebut mengalami kenaikan, namun di tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada tahun 2018 hingga tahun 2019, dana mengalami kenaikan yang cukup signifikan dikarenakan kondisi keuangan Negara dan Penerima bantuan masih banyak dari segi data, namun kelemahannya adalah data tersebut tidak terlalu selektif dalam memilih dan menetapkan data penerima bantuan tersebut, sehingga masih banyak nya penerima yang seharusnya berhak menerima bantuan tersebut tidak menerimanya bantuan.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Kasi Perencanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Bapak Syah Indrapura Utama, S.T mengatakan bahwa penyebab terjadinya penurunan anggaran pada tahun 2020 ini didasarkan pada situasi keuangan negara dan bagaimana mencari penerima bantuan yang berhak, oleh sebab itu pemberian bantuan untuk program ini masih belum optimal, seharusnya pada tahun 2020 ini dana mengalami kenaikan, namun karena kondisi Covid dan juga makin sulitnya mencari penerima yang benar-benar berhak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam upaya menghadapi permasalahan perumahan dan pemukiman tersebut, pemerintah menetapkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya melalui Kementerian Perumahan Rakyat. Berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Munculnya program bantuan stimulan perumahan swadaya merupakan bentuk kelanjutan dari program bidang perumahan lainnya yang telah dibuat oleh pemerintah. Adapun yang membedakan program bantuan stimulan perumahan swadaya dengan program bidang perumahan lainnya yaitu program ini memiliki dua jenis kegiatan yaitu peningkatan kualitas bangunan serta pembangunan baru. Dimana program yang telah dijalankan pemerintah sebelumnya hanya berfokus kepada peningkatan kualitas bangunan saja. Sasaran penerima bantuan ini adalah masyarakat yang masih memiliki atau bertempat tinggal di pemukiman atau rumah yang masih dibawah standar layak, yakni dibawah kategori semi permanen, rumah-rumah ini banyak kita jumpai dipinggiran Kota Pekanbaru dan juga pada kawasan padat permukiman di Kota Pekanbaru.

Program tersebut dilaksanakan pada lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru melalui Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2016, namun seperti yang diketahui banyak rumah tidak layak huni yang ada di Kota Pekanbaru tidak seluruhnya masuk kedalam lokasi perumahan kumuh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dan pemukiman kumuh tersebut. Kemudian adanya penerima bantuan tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, seperti masyarakat dengan golongan ekonomi sedang, masyarakat yang telah menerima bantuan lain dari pemerintah dan masyarakat dengan kondisi rumah masih layak huni. Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Pekanbaru dapat dikatakan belum berhasil secara target. Hal ini dikarenakan penyaluran bantuan Stimulan perumahan Swadaya belum sepenuhnya terealisasi. Serta adanya indikasi penerima bantuan yang tidak tepat sasaran dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Pekanbaru (Raya, 2019).

Berdasarkan uraian diatas dapat diuraikan beberapa fenomena mengenai Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diantaranya :

1. Banyak rumah tidak layak huni yang ada di Kota Pekanbaru tidak seluruhnya masuk kedalam lokasi perumahan kumuh dan pemukiman kumuh
2. Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya belum berhasil secara target
3. Penerima bantuan belum tepat sasaran dalam pelaksanaannya

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena untuk mengetahui pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Sadaya yang tekah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru. Dengan adanya penelitian ini diharapkan nantinya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru mampu menjalankan program-program yang telah dirancang oleh Pemerintah dengan optimal serta mampu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa membangun serta meningkatkan kualitas rumahnya secara swadaya sehingga bisa menghuni rumah yang layak huni dan lingkungan yang sehat dan aman.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, mengenai hal ini penulis tertarik melakukan penelitian dengan merumuskan judul penulisan yaitu “**Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru ?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dalam penelitian ini membuat tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi perkembangan khazanah ilmu administrasi negara, terutama dalam bidang Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan tentang serta syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (S1)

b. Bagi Lokasi Penelitian

Sebagai bahan masukan dan tambahan bagi dan memperbaiki ke arah yang lebih baik lagi.

c. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan pembaca, serta dapat dijadikan bahan acuan bagi penulis selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang sama dan menjadi referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Bagi Pihak Lainnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan pelaksanaan program Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Dinas Perumahan Rakyat.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, teori-teori yang diangkat penulis yaitu mengenai teori-teori tentang pembangunan, kemiskinan dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berbicara tentang gambaran umum lokasi, baik itu berbicara tentang sejarah ataupun bagaimana keadaan daerah tersebut.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat hasil dari pembahasan dari penelitian pembahasan yang dilakukan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dari penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca dan lembaga pendidikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan adalah sebagai tindakan-rindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan. Van Meter dan Van Horn dalam (Wahab, 2014) mengemukakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Implementasi merupakan aspek penting dari seluruh proses kebijakan, implementasi adalah langkah lanjutan dari suatu kebijakan formulasi. Implementasi dalam kebijakan publik adalah salah satu tahapan penting yang harus dilakukan karena pada dasarnya implementasi kebijakan merupakan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi dalam hal ini merupakan cara pelaksanaan atau penerapan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah selesai dibuat sebelumnya oleh para pembuat kebijakan.

Implementasi kebijakan menurut (Deddy Mulyadi, 2016) adalah suatu yang mengarah pada tindakan demi tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dalam suatu keputusan. Dimana implementasi merupakan proses pelaksanaan suatu keputusan dasar. Proses yang dimaksud tersebut terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan
2. Pengimplementasian keputusan oleh instansi/lembaga pelaksana
3. Kesiadaan kelompok sasaran menjalankan keputusan
4. Dampak nyata dari keputusan, baik yang telah dikehendaki maupun tidak
5. Dampak keputusan yang diharapkan oleh instansi/lembaga pelaksana
6. Upaya perbaikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh para aktor-aktor pelaksana kebijakan yang berperan sehingga nanti akhirnya akan tercapai implementasi yang sesuai dengan yang diinginkan dan juga akan menerima sebuah hasil yang memang sesuai dengan tujuan apapun sasaran kebijakan itu sendiri. Implementasi itu tidak dimulai sebelum tujuan dan sasaran kebijakan telah diidentifikasi atau ditetapkan oleh para pembuat keputusan kebijakan.

2.1.1 Unsur-Unsur Pelaksanaan Kebijakan

Unsur-unsur dari pelaksanaan kebijakan yang mutlak dan harus ada yaitu :

1. Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana adalah implementator kebijakan Dimock dalam (Tachjan, 2006), pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Adanya Program yang Dilaksanakan

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa adanya tindakan yang nyata dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan. Program kegiatan merupakan rencana yang komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan.

3. Target Group atau Kelompok Sasaran

Target group atau kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

2.1.2 Prinsip Efektif Pelaksanaan Kebijakan

Menurut Richard Martland dalam (Nugroho, 2003) pada prinsipnya ada empat tepat yang perlu dipenuhi dalam hal pencapaian keefektifan pelaksanaan kebijakan, diantaranya :

1. Pertama, kebijakan itu sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dimulai dari sejauh mana kebijakan yang ada, telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Sisi kedua dari kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga adalah apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakannya.
2. Kedua, tepat pelaksanaannya. Aktor implementasi tidak hanya pemerintah, melainkan ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

pemerintah, kerjasama antara pemerintah, masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan yang bersifat monopoli seperti KTP. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat seperti penanggulangan kemiskinan. Kebijakan yang bersifat mengarahkan kegiatan masyarakat.

3. Ketiga, tepat target. Ketepatan ini berkaitan dengan tiga hal, pertama apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua apakah target dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Ketiga apakah intervensi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

4. Keempat, tepat lingkungan. Ada dua lingkungan yang paling menentukan yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Lingkungan eksternal sebagai variabel eksogen terdiri dari opini publik, yaitu persepsi publik kebijakan dan implementasi kebijakan, lembaga interpretasi dengan lembaga strategis dalam masyarakat, individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan implementasi kebijakan.

2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan

Meter dan Horn dalam (Subarsono, 2005) mengadopsi model sistem kebijaksanaan yang pada dasarnya menyangkut beberapa komponen yang harus

selalu ada agar tuntutan kebijaksanaan bisa direalisasikan menjadi hasil kebijaksanaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut :

1. Standar Kebijaksanaan dan Tujuan

Yaitu rincian tujuan keputusan kebijaksanaan secara menyeluruh yang berwujud dokumen peraturan menuju penentuan standar yang spesifik dan konkrit untuk menilai kinerja program

2. Sumber Daya

Kebijaksanaan mencakup lebih dari sekedar standar sasaran, tapi juga menuntut ketersediaan sumber daya yang akan memperlancar implementasi. Sumber daya ini dapat berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staff agen, dukungan legislatif dan eksekutif, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan.

4. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Implementasi membutuhkan mekanisme dan prosedur institusional yang mengatur pola komunikasi antar organisasi mulai dari kewenangan yang lebih tinggi hingga rendah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Lingkungan berpengaruh terhadap implementasi program, diantaranya sumber daya ekonomi yang dimiliki organisasi pelaksana, bagaimana sifat opini publik, dukungan elit, peran dan kelompok-kelompok kepentingan dan swasta dalam menunjang keberhasilan program.

6. Disposisi Sikap Para Pelaksana

Persepsi pelaksana dalam organisasi dimana program itu diterapkan, hal ini dapat berubah sikap menolak, netral dan menerima yang berkaitan dengan sistem nilai pribadi, loyalitas, kepentingan pribadi dan sebagainya.

2.2 Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

2.2.1 Konsep Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) lahir berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1992. Pada pasal 54 Undang-undang No. 1 Tahun 2011 disebutkan bahwa: (1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan, (3) kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,

sebagaimana yang dimaksud ayat 2 dapat berupa: a) subsidi perolehan rumah; b) stimulan rumah swadaya; c) prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Menindaklanjuti berlakunya Undang-undang tersebut, selanjutnya Kementerian Perumahan Rakyat menerbitkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan sosial kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

Penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yaitu masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menempati rumah tidak layak huni. Masyarakat Berpenghasilan Rendah berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan dari pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Sedangkan rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas, dan kesehatan bangunan. Maksud kegiatan BSPS adalah untuk meningkatkan prakarsa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan.

Selain berpenghasilan rendah dan menempati rumah tidak layak huni penerima bantuan diutamakan dari masyarakat yang telah memiliki rencana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

membangun atau meningkatkan kualitas rumah, yang dibuktikan dengan memiliki tabungan bahan bangunan, sebelumnya telah memulai membangun rumah, memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan, dan memiliki tabungan uang yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS. Lingkup bantuan stimulan ini yaitu :

1. Pembangunan Baru / Perbaikan Total Pelaksanaan kegiatan pembangunan baru atau perbaikan total ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah penerima bantuan yang memiliki tanah tetapi belum memiliki rumah, dalam rangka kegiatan pembuatan bangunan rumah layak huni di atas tanah matang.
2. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dikhususkan untuk penerima bantuan yang sudah memiliki rumah akan tetapi rumah yang ditempati kurang layak huni, dalam rangka kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.
3. Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas umum (PSU) Pembangunan PSU dibedakan menjadi 2 yaitu yang melekat pada rumah swadaya dan/atau PSU yang melayani komunitas penerima bantuan. Utilitas yang melekat pada rumah swadaya adalah penyambungan daya listrik, penyambungan air bersih, dan/atau kamar mandi/WC. Sedangkan PSU yang melayani komunitas penerima bantuan yakni sarana MCK umum/komunal, jalan lingkungan, jalan setapak, saluran air hujan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(drainage), penerangan jalan umum, sumber dan jaringan air bersih, tempat pembuangan sampah, sumber listrik ramah lingkungan, jaringan listrik, dan/ atau sarana sosial lainnya seperti tempat ibadah atau balai warga.

2.2.2 Tujuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Tujuan dari program ini adalah untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa membangun serta meningkatkan kualitas rumahnya secara swadaya sehingga bisa menghuni rumah yang layak huni dan lingkungan yang sehat dan aman.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 dalam (Ismi, 2019) rumah bisa dikatakan layak huni apabila bisa memenuhi persyaratan keselamatan dan juga kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan para penghuni-penghuninya. Rumah layak huni yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Faktor Kesehatan

- a. Salah satu kriteria rumah layak huni atau tidak adalah dari sisi kesehatan, tempat tinggal dianggap layak huni harus berada di lokasi rumah yang tidak terkena banjir dan juga tidak lembab.
- b. Utilitas jaringan listrik yang bisa berfungsi juga menjadi hal penting dari rumah yang layak huni. Setiap lingkungan rumah harus mendapatkan daya listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) minimum 450 Volt Ampere, tersedia juga penerangan jalan umum dan setiap ruangan harus memenuhi persyaratan pencahayaan serta sirkulasi udara yang baik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- c. Jaringan air bersih yang tersedia dari PDAM atau dari sumur pompa juga tersedia. Syarat air bersih yang layak konsumsi adalah jika dengan fisik terlihat jernih, tidak berasa dan tidak berbau.
2. Faktor keamanan bangunan
 - a. Bangunan rumah wajib memenuhi persyaratan teknis dan pemilihan material bangunan yang tepat
 - b. Bagian atap harus mempunyai kemiringan yang sesuai dengan bahan penutup yang dipakai sehingga tidak mengakibatkan bocor
 - c. Bagian lantai terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, tidak lembab dan kuat menahan beban
 - d. Pada bagian dinding harus mampu menahan beban di atasnya dan juga dapat menahan berat angin. Untuk dinding kamar mandi harus memiliki ketinggian 1,5 meter di atas permukaan lantai.

3. Keindahan dan kenyamanan

Rumah harus dirancang dengan indah dan nyaman. KemenPUPR menyarankan menggunakan model arsitektur lokal dan penataan serta penentuan besaran ruangan yang optimal.

2.2.3 Kriteria Penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Perumahan swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan. Kriteria Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berikut ini terdapat

beberapa kriteria bantuan menurut Peraturan Menteri Perumahan No. 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan BSPS dalam (Nursifa, 2021), yakni:

1. Kriteria Penerima Bantuan

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. MBR dengan penghasilan dibawah upah minimum provinsi rata-ratanasional atau masyarakat miskin sesuai dengan data dari Kementerian Sosial;
- c. Sudah berkeluarga;
- d. Memiliki atau menguasai tanah;
- e. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni;
- f. Belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah atau pemerintah daerah, termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran atau kerusuhan sosial;
- g. Didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan:
- h. Memiliki tabungan bahan bangunan;
- i. Telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuanstimulan;
- j. Memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS;
- k. Memiliki tabungan uang yang dapat dijadikan dana tambahanBSPS.
- l. Bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan stimulanperumahan swadaya; dan
- m. Dapat bekerja secara kelompok.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2.

Kriteria Objek Bantuan adalah

- a. Rumah tidak layak huni yang berada di atas tanah:
- b. dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya
- c. Bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi
- d. Tidak dalam status sengketa, dan
- e. Penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang :

2.2.4 Implementator Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Sementara menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Swadaya, pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Swadaya dilaksanakan oleh Pokja Pusat dan Pokja Provinsi dan Pokja Kabupaten/Kota.

1. Kelompok Kerja Pusat

Kelompok Kerja Pusat terdiri dari Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kementrian Perumahan Rakyat, Sekretariat Kementrian Perumahan Rakyat, Pusat Pengembangan Perumahan Kementrian Perumahan Rakyat. Tugasnya dalam Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu :

- a. Menyiapkan bahan perumusan pedoman pelaksanaan kegiatan
- b. Mensosialisasikan program dari kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
- c. Menyiapkan rumusan penetapan Kabupaten/Kota penerima bantuan dan rencana sasaran bantuan stimulan perumahan swadaya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menyampaikan hasil verifikasi administrasi calon penerima bantuan kepada Pokja Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi lapangan
- e. Merumuskan penetapan masyarakat berpenghasilan rendah penerima bantuan untuk ditetapkan kepala satuan kerja
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan bantuan stimulan kepada Deputi berdasarkan laporan yang telah disampaikan oleh UPK/BKM.

2. Kelompok Kerja Provinsi

Kelompok kerja Provinsi terdiri atas Unsur SKPD yang menangani tentang perumahan, Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Unsur Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Unsur SKPD yang menangani tentang bidang pemberdayaan masyarakat. Keanggotaan Kelompok Kerja Provinsi ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur. Tugasnya pada pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yaitu :

- a. Mengkoordinasikan kelompok kerja Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugasnya
- b. Mengendalikan pelaksanaan tugas kelompok kerja Kabupaten/Kota
- c. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan stimulasi

3. Kelompok Kerja Kabupaten/Kota

Kelompok kerja Kabupaten/Kota terdiri dari Unsur SKPD yang menangani tentang bidang perumahan, Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Unsur Kantor Pertanahan, Unsur SKPD yang menangani tentang Bidang Pemberdayaan Masyarakat, unsur SKPD yang menangani tentang bidang sosial.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keanggotaan Kelompok Kerja Kabupaten/Kota ditetapkan dengan surat keputusan Bupati/Walikota. Tugasnya dalam pelaksanaan yaitu :

- a. Memverifikasi lapangan data calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya dan hasil verifikasi administrasi tersebut dilakukan oleh kelompok kerja pusat
- b. Menyampaikan calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya dan hasil verifikasi lapangan kepada satuan kerja dengan tembusan kepada kelompok kerja pusat.
- c. Melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap UPK/BKM, TPM dan KSM
- d. Melapor pelaksanaan tugas kebijakan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan untuk kelompok kerja provinsi dan kelompok kerja pusat.

2.2.5 Kelompok Sasaran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Kelompok sasaran bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) kelompok sasaran program ini adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) beranggotakan MBR penerima bantuan stimulan perumahan swadaya. Jumlah KSM paling rendah yaitu 5 orang dan paling tinggi yaitu 11 orang. Adapun tugas KSM antara lain :

1. Menyusun Rencana Tindak Komunitas (RTK) dan DED pembangunan perumahan PSU yang mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya
2. Membangun rumah yang mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya

3. Melapor manfaat dana bantuan stimulan dan pembangunan rumah swadaya pada UPK/BKM
4. Menyetujui dan membuat daftar hadir pada TPM

2.2.6 Bentuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Bentuk bantuan yang diberikan adalah berupa uang dan barang. Bantuan dalam bentuk barang dapat diambil ditoko bangunan yang telah ditunjuk senilai 15 juta dan bantuan dalam bentuk uang dapat dicairkan dibank atau dikantor pos senilai 2,5 juta dan uang tersebut digunakan untuk biaya tukang bangunan.

2.3 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi yang diharapkan dapat menciptakan proses penguatan sosial yang dapat mengantar masyarakat miskin menuju masyarakat yang madani, sejahtera, berkeadilan serta berlandaskan iman dan takwa. Sebagai tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hal yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Sumodiningrat, 2009).

Adapun konsep pemberdayaan tidak mempertentangkan pertumbuhan dan pemerataan, konsep ini berpandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkelanjutan. Menurut (Hikmat, 2001) upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tiga hal :

1. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi manusia berkembang. Titik tolaknya adalah penekanan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi-potensi kemudian diberikan motivasi dan penyadaran bahwa potensi itu dapat dikembangkan.
2. Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dimana perlu langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan serta pembukaan berbagai akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat mampu dan memanfaatkan peluang. Pemberdayaan pada jalur ini dapat berupa pemberian berbagai bantuan produktif, pelatihan, pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial dan pengembangan kelembagaan di tingkat masyarakat.
3. Pemberdayaan mengandung arti pemihakan pada pihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

Dari pengertian dapat dikatakan bahwa pemberdayaan merupakan proses partisipatif, pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh masyarakat dimana lembaga pendukung hanya memiliki peran sebagai fasilitator. Penerima manfaat program pemberdayaan adalah kelompok-kelompok marginal dalam masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada tingkat penentu kebijakan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pembangunan yang semakin terbatas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.1 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama pemberdayaan adalah untuk memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal, maupun karena kondisi eksternal (Soekanto, 2017). Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi :

1. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis
2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
3. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga

Dari tujuan pemberdayaan masyarakat diatas dapat dikatakan bahwa tujuan pemberdayaan adalah mendirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Karena pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat, ini menunjukkan bahwa masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.

2.3.2 Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat

Menurut (Noor, 2010) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat harus melibatkan berbagai potensi yang ada dalam masyarakat, beberapa elemen yang terkait misalnya :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Peranan Pemerintah dalam artian birokrasi, pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan misi, mampu membangun partisipasi, membuka dialog dengan masyarakat, menciptakan instrument peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat bawah.
2. Organisasi-organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan Nasional maupun Lokal.
3. Lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan didalam masyarakat itu sendiri (*Local Community Organization*) seperti BPD, PKK, Karang Taruna dan sebagainya.
4. Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat yang merupakan organisasi sosial berwatak ekonomi dan merupakan bangun usaha yang sesuai untuk demokrasi ekonomi Indonesia.
5. Pendamping diperlukan karena masyarakat miskin biasanya mempunyai keterbatasan dalam pengembangan diri dan kelompoknya.
6. Pemberdayaan harus tercermin dalam proses perencanaan pembangunan nasional sebagai proses bottom-up.
7. Keterlibatan masyarakat yang lebih mampu khususnya dunia usaha dan swasta

2.3.3 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut (Adi, 2012) pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh pemberdayaan sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tahap persiapan

Pada tahap ini ada dua tahapan yang dikerjakan, pertama pempinan petugas yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community woker*, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara direktif.

2. Tahapan Pengkajian (*assessment*)

Pada tahap ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

3. Tahap Perencanaan Alternatif Program

Pada tahap ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

4. Tahap Performalisasi Rencana Aksi

Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu juga petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka kedalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sintang
Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Tahap Pelaksanaan (Impelemntasi) Program

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan.

6. Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

7. Tahap Terminasi

Tahap ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran, dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.

2.4 Pandangan Islam tentang Kemiskinan

Islam memandang kemiskinan sebagai suatu problem yang memerlukan solusi, bahkan bahaya yang mesti segera diatasi dan dicarikan jalan keluar. Dalam mengentaskan kemiskinan Islam mendahulukan langkah-langkah positif dan solusi-solusi prosedural yang realistis. Dalam Islam jalan keluarnya telah diatur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sejak lama, dengan kewajiban berkerja bagi yang mampu, shadaqah, dan zakat. Oleh karena itu, dalam sebuah negara dan pemerintahan yang menerapkan syariat-syariat Islam, pemandangan kemiskinan yang kita saksikan bukan tidak mungkin terhapuskan sama semua. Islam pada dasarnya adalah agama yang memiliki konsep keadilan, dengan panduan-panduan prinsip berdasarkan AL-Qur'an dan Hadist dalam berbagai hal seperti ekonomi, politik, kultural baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Islam juga mengatur hal yang berhubungan dengan kehidupan umat manusia.

Sebagai aparatur negara, pemerintah berkewajiban mencukupi setiap kebutuhan warga negaranya, melalui sumber-sumber dana yang sah. Negara berkewajiban untuk meringankan dan membantu agar dapat memudahkan beban orang-orang yang berpenghasilan rendah, Al-Qur'an mewajibkan kepada setiap muslim untuk berpartisipasi menanggulangi kemiskinan sesuai dengan kemampuannya. Bagi yang tidak memiliki kemampuan material maka paling sedikit partisipasinya diharapkan dalam bentuk merasakan, memikirkan dan mendorong pihak lain untuk berpartisipasi secara aktif. Sebagaimana pandangan islam dalam Al-Qur'an Surat al-Hasyr ayat 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Menurut pandangan islam, negara harus menggunakan berbagai sarana untuk menghapus kemiskinan dan menjamin kehidupan yang layak bagi warganya. Dengan demikian terciptalah solidaritas Islam dalam suatu masyarakat. Selain itu Rasulullah SAW dalam sebuah Hadist, tentang kebijakan pengeluaran pendapatan negara di distribusikan langsung kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan harus dikelola dengan agar dapat dipertanggung jawabkan, sebagaimana yang termuat dalam salah satu hadist yang berbunyi sebagai berikut :

“Dari Ibnu Umar RA dan Nabi Muhammad SAW sesungguhnya bersabda, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggung jawaban perihal rakyatnya dan akan diminta pertanggung jawaban atas perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri adalah pemimpin atas rumah tangganya dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggungan jawabnya. Seorang pembantu rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggung jawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya atas pertanggung jawabannya”. (H.R Muslim)

2.5 Definisi Konsep

Menurut Singarimbun (2006:34) berpendapat bahwa konsep adalah abstraksi mengenai fenomena yang dirumuskan atau dasar generalisasi atas jumlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Untuk memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna untuk menghindari salah pengertian, maka definisi beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian ini akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang yang diarahkan pada tercapainya tujuan tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan, yang dimaksud dalam hal ini adalah

2. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Pekanbaru merupakan jenis Peningkatan Kualitas (PK) Rumah.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi yang diharapkan dapat menciptakan proses penguatan sosial yang dapat mengantar masyarakat miskin menuju masyarakat yang madani, sejahtera, berkeadilan serta berlandaskan iman dan takwa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Referensi Peraturan Perundang Undangan

Pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya dilaksanakan dengan beberapa regulasi Peraturan Perundang undangan dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat, regulasinya adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 1 Tahun 2011

Undang-Undang ini terkait dengan Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1992. Pada pasal 54 Undang-undang No. 1 Tahun 2011 disebutkan bahwa: (1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan, (3) kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sebagaimana yang dimaksud ayat 2 dapat berupa: a) subsidi perolehan rumah; b) stimulan rumah swadaya; c) prasarana, sarana, dan utilitas umum.

2. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013

Peraturan ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan sosial kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Dinas Perumahan Rakyat. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang diperoleh dari jurnal-jurnal di lapangan.

1. Penelitian Ashifa Rizki Priadi (2018) dalam jurnal yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni Di Kabupaten Langkat”. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam penyediaan perumahan yang layak huni di Kabupaten Langkat belum berjalan optimal. Termasuk kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat serta kurangnya pengetahuan tentang program BSPS. Selain itu, dalam tahap pembangunan yang harus dilakukan dalam gotong royong dengan kelompok yang telah ditentukan tetapi pada kenyataannya masih dilakukan secara individual. Peneliti juga melihat bahwa implementor program ini belum memiliki ketegasan karena masih membiarkan masyarakat bekerja secara individual dan cenderung apatis. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Perbedaannya adalah penulis membahas mengenai pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Pekanbaru, sedangkan dalam jurnal Ashifa Rizki Priadi membahas mengenai Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni Di Kabupaten Langkat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ulfa Dadan Raya (2019) dalam Jurnal yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Pekanbaru”, dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pelaksanaannya belum efektif, hal ini ditandai dengan tidak tepatnya pengukuran waktu, penghitungan biaya dan ketepatan sasaran program. Selain itu terpadat faktor-faktor yang menjadi penghambat efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Pekanbaru yaitu pengawasan dan kewenangan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Perbedaannya adalah penulis membahas mengenai pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Pekanbaru, sedangkan pada jurnal Ulfa Dadan Raya membahas mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Pekanbaru.

3. Inggriani (2015) dalam Jurnal yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Dharmasraya”, dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Dharmasraya belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan sumber daya pendukung untuk pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dharmasraya kurang memadai, khususnya sumber daya manusianya dan koordinasi antara masyarakat, Bappeda serta Kemenpera belum berjalan seperti yang diharapkan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Perbedaannya adalah penulis membahas mengenai pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Pekanbaru, sedangkan pada jurnal Inggriani membahas mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Dharmasraya.

4. Sefrika (2019) dalam Jurnal yang berjudul “Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) KemenPUPR”, dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kriteria penerima BSPS yang paling tepat adalah kriteria wilayah dengan kriteria kemiskinan yang tinggi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap 5 Kecamatan di daerah Kabupaten Bogor, maka didapatkan nilai preferensi alternatif alternatif sebanyak 0,54 dengan kriteria C1 yaitu tingkat kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut, maka kriteria Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diberikan olehn KemenPUPR yang dilakukan uji terhadap 5 Kecamatan di Kabupaten Bogor, maka kriteria penerima bantuan utama harus diberikan kepada Kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Hasil uji coba bisa dilakukan terhadap wilayah lain yang ada di Kota dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten serta Provinsi seluruh Indonesia dengan sampel uji yang lebih banyak. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Perbedaannya adalah penulis membahas mengenai pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Pekanbaru, sedangkan pada jurnal Sefrika membahas mengenai Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) KemenPUPR

5. Asminar (2020) dalam Jurnal yang berjudul “Tingkat Kesejahteraan Petani Penerima Pemberian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Kuamang Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo”, dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kesejahteraan petani penerima bantuan stimulan perumahan swadaya sesuai dengan indikator BPS 2017 di Desa Kuamang Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo kategori sedang dengan nilai 1.60. Rumah yang dimiliki adalah rumah layak huni setelah adanya bantuan BSPS dan mayoritas gaji masyarakat penerima bantuan stimulan perumahan swadaya masih dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP) kurang lebih 1.500.000 yang mayoritas bekerja sebagai buruh petani. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Perbedaannya adalah penulis membahas mengenai pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang dilakukan oleh Dinas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Pekanbaru, sedangkan pada jurnal Asminar membahas Jurnal Tingkat Kesejahteraan Petani Penerima Pemberian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Kuamang Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo.

2.8 Konsep Operasional

Menurut (Singarimbun, 2006) definisi konsep operasional merupakan suatu cara untuk mengukur variabel-variabel, sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui apa saja yang diketahui sebagai penduduknya untuk dianalisa dari variabel tersebut.

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 2.1 Konsep Operasional

Konsep/Referensi	Indikator	Sub indikator
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 47 tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	1. Swadaya Masyarakat	a. Bersifat stimulan dalam rangka peningkatan kualitas rumah agar layak huni. b. Diperlukannya komitmen serta kesiapan masyarakat berupa dana
	2. Pemberdayaan Masyarakat	a. Merencanakan kegiatan b. Membangun dan mengelola pelaksanaan kegiatan bantuan c. Mengawasi jalannya kegiatan bantuan
	3. Transparan	a. Kegiatan dilaksanakan secara terbuka b. Evaluasi oleh semua pihak
	4. Dapat Dipertanggung Jawabkan	a. Dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat penerima bantuan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

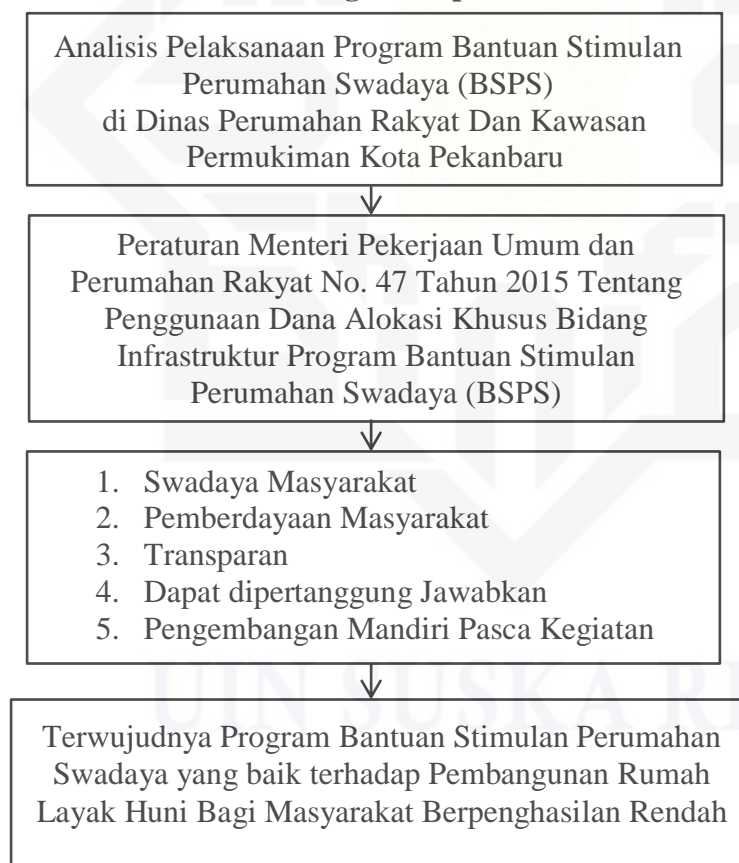
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep/Referensi	Indikator	Sub indikator
		b. Dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat yang tidak penerima bantuan
	5. Pengembangan Mandiri Pasca Kegiatan	a. Pengembangan atas inisiatif penerima bantuan dana dan bangunan b. Pengembangan dengan dana masyarakat itu sendiri

2.9 Kerangka Pemikiran

Adapun bagian alur kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru yang merupakan tempat pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli hingga Agustus 2021.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2011) metode deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya.

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data yang diperlukan, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya di dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain (Arikunto, 2013).

Adapun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

1. Sejarah singkat Kota Pekanbaru
2. Letak geografis Kota Pekanbaru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Dinas Perumahan Rakyat

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku serta dokumen (Sugiyono, 2011).

3.3 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian (Sugiyono, 2011). Informasi yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan.

Informan dalam Penelitian ini sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Perumahan

Pemilihan Kepala Bidang Perumahan sebagai informan dalam penelitian ini karena Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan perumahan, serta bertugas melakukan pendataan dan perencanaan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah tangga dan rumah komersil.

2. Kasi Pendataan dan Perencanaan Perumahan

Pemilihan Kasi Pendataan dan Perencanaan Perumahan sebagai informan dalam penelitian ini karena Kasi Pendataan dan Perencanaan Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perumahan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan sub urusan pendataan dan perencanaan. Dalam hal ini berupa pendataan dan perencanaan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.

3. Kasi Penyediaan dan Pelaksanaan

Pemilihan Kasi Penyediaan dan Pelaksanaan sebagai informan dalam penelitian ini karena Kasi Penyediaan dan Pelaksanaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perumahan dalam melaksanakan sub urusan Penyediaan dan Pelaksanaan. Dalam hal ini berupa penyediaan dan pelaksanaan fasilitasi, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.

4. Staff Bidang Perumahan

Pemilihan Staff Bidang Perumahan sebagai informan dalam penelitian ini karena Staff Bidang Perumahan mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan perumahan seperti penyiapan kondisi perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya yang diperhitungkan dari kependudukan, fisik bangunan, lingkungan perumahan termasuk sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada.

5. Masyarakat Penerima Bantuan Perumahan Swadaya

Masyarakat penerima Bantuan Perumahan Swadaya sebagai informan dalam penelitian ini karena sebagai menerima secara langsung pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini karena bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan program Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, pihak Kelurahan mempunyai tugas untuk mendata masyarakat yang memenuhi kriteria rumah tidak layak huni.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan yang diharapkan, maka peneliti harus mencari data, informasi dan keterangan-keterangan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan atau lokasi penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian (Widoyoko, 2014). Metode ini menggunakan teknik dengan mengamati langsung serta mencatat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Abu Achmadi, 2004), sehingga akan menghasilkan data yang akurat mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

Melalui metode observasi yang dilakukan maka diperlukan dokumentasi yang mendukung pengumpulan data tersebut yaitu dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mencari, menemukan, dan mengumpulkan catatan-catatan, agenda, dan foto-foto yang berkaitan dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

Dalam penelitian ini teknik observasi dilakukan dengan mewawancarai responden secara langsung di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru. Objek yang diobservasi yaitu pegawai di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru. Dengan hal tersebut dapat diketahui gambaran tentang Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara peneliti dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. (P. Joko Subagyo, 2011). Menurut (Arikunto, 2010) wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi terwawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data.

Untuk mendapatkan data mengenai analisis pelaksanaan program ini, maka peneliti melakukan tanya jawab dengan informan (Tabel 3.1) di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru. Dalam wawancara ini peneliti melakukan wawancara terstruktur atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

wawancara terbuka dengan informan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. (Sugiyono, 2015). Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa arsip-arsip, catatan-catatan, agenda, dan foto-foto yang berkaitan dengan Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

3.5 Metode Analisa

Analisis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milah nya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain (Moleong, 2011).

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011) mengemukakan terdapat 3 langkah dalam analisis data yaitu :

1. Reduksi Data

Menurut (Sugiyono, 2011) mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan polanya. Tahap ini merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif yang merupakan penyederhanaan, penggolongan dan membuang yang tidak perlu sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam mengambil kesimpulan.

2. Display Data/Penyajian Data

Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2011) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam tahap ini merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif biasanya berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak,

karena masalah dan rumusan masalah bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan obyektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 (7 September 1987) Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari 62,96 Km² menjadi 446,50 km², terdiri dari 12 kecamatan dan 45 kelurahan. Namun dari hasil pengukuran atau pematokan dilapangan oleh Badan Pertanahan Nasional Tingkat I Riau, maka ditetapkan luas Kota Pekanbaru adalah 632, 26 km². Kota Pekanbaru adalah ibu kota terbesar di Provinsi Riau, kota ini merupakan salah satu sentral ekonomi terbesar dibagian Timur pulau Sumatera dan termasuk sebagai Kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi.

Kota ini berawal dari sebuah pasar (pekan) yang didirikan oleh para pedagang Minangkabau di tepi sungai Siak pada abad ke-18. Hari jadi Kota Pekanbaru ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah dewan Menteri dari Kesultanan Siak yang terdiri dari datuk empat suku (Pesisir, Limapuluhm Tanah Datar dan Kampar). Kota pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri terutama berkaitan dengan minyak bumi serta pelaksanaan otonomi daerah.

Secara umum Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah-daerah berikut :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Pelalawan

3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

4.2 Profil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, mempunyai Tugas Menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pemerintahan untuk membantu Walikota Pekanbaru dalam Menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Secara kelembagaan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 95 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mengemban sebagian urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Permukiman.

4.3 Visi dan Misi

Visi:

Terwujudnya infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang handal, dan berkelanjutan menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Misi:

1. Meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan internal dan eksternal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Melakukan pemberdayaan masyarakat dan para pelaku kunci lainnya dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
3. Meningkatkan kualitas tempat bermukim dan berusaha masyarakat melalui pencegahan dan pengendalian kawasan kumuh perkotaan
4. Memfasilitasi dan mendorong terciptanya iklim yang kondusif di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
5. Keningkatkan ketersediaan dan layanan rumah layak huni yang terjangkau
6. Meningkatkan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan sarana dan prasarana dan utilitas umum.

4.4 Tugas dan Fungsi

1. Tugas

Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan bidang permukiman Kota Pekanbaru.

2. Fungsi

Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas.

- a. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
- b. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur dinas.
- c. Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur dinas.
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana.
- f. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
- g. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.
- h. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) permukiman.
- i. Perencanaan, penyediaan, pembangunan, penataan, pengelolaan, pemeliharaan.

4.5 Potensi Pegawai

Tabel 4.1 Potensi Pegawai

No	Jejang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Strata 2 (S2)	8	-	8
2.	Strata 1 (S1)	23	7	30
3.	Diploma III	3	1	4
4.	SLTA/Sederajat	14	2	16
	Jumlah	48	10	58

Sumber: SubBagian Umum Tahun 2021

4.6 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Sumber: Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan optimal. Untuk indikator swadaya masyarakat, transparan, dapat dipertanggungjawabkan sudah terlaksana dengan optimal. Sedangkan indikator pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan tahap perencanaan yang dimulai dari sosialisasi oleh tim teknis BSPS masih jarang dilakukan sosialisasi sehingga masih banyak masyarakat yang kurang tau tentang tahap-tahap mengikuti BSPS. Serta Indikator pengembangan mandiri pasca kegiatan belum terlaksana dengan optimal karena masyarakat masih sedikit yang melakukan pengembangan atas inisiatif sendiri

Beberapa indikator yang belum terlaksana dengan optimal berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, dengan komitmen serta kesiapan berupa dana swadaya yang belum optimal dan masyarakat kurang mampu melakukan pengembangan pasca kegiatan pasca BSPS, tetapi Swadaya yang disiapkan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing masyarakat. Dalam pelaksanaan program masyarakat diikut sertakan dalam melakukan perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan serta pengawasan. Kegiatan pembangunan rumah dilakukan secara transpansi, dapat dipertanggung jawabkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk mendukung berjalannya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dibutuhkan kegiatan sosialisasi program yang merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat akan tetapi kegiatan ini belum tercapai. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan sosialisasi yang belum sistematis dan sosialisasi masih manual, dengan adanya perkembangan sosialisasi akan lebih baik jika dilakukan menggunakan media digital contohnya menggunakan media sosial sehingga program BSPS tersampaikan kepada seluruh masyarakat.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru adalah masih kurangnya anggaran dalam pelaksanaan program BSPS, tidak semua masyarakat yang akan menerima bantuan BSPS ini mampu untuk memberikan swadaya, kurang tepatnya sasaran Sehingga masih adanya masyarakat yang protes karna tidak mendapatkan program bantuan ini, hal ini dikarenakan pemerintah harus memilih masyarakat yang berhak sesuai dengan syarat dan kriteria yang ditentukan.

6.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis memberi saran kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru agar pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar lebih ditingkatkan agar kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah menjadi lebih baik serta mampu mengurangi jumlah angka kemiskinan khususnya di Kota Pekanbaru. Dalam pelaksanaan program perlu memperhatikan kembali masyarakat yang menjadi target pelaksanaan program karena masih ada yang tidak mampu untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



melakukan swadaya, untuk itu pemerintah perlu membantu masyarakat yang tidak memiliki kemampuan swadaya agar mewujudkan rumahnya bisa menjadi layak huni.

Penting juga untuk memperhatikan jumlah dana, adanya keterbatasan anggaran setiap tahunnya di harapkan pemerintah dapat meningkatkan lagi anggaran untuk melaksanakan program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya. Untuk pelaksanaan progam yang akan dilakukan kembali, Pemerintah perlu melakukan verifikasi dan identifikasi kembali dengan teliti kepada masyarakat yang akan menerima bantuan, agar tidak terjadi tumpang tindih program bantuan pembangunan rumah setelah diverifikasi. Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tidak terfokus pada satu wilayah tertentu agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan pada lain yang tidak menerima bantuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an Surat al-Hasyr ayat 7

Buku

Abdul Wahab, Solichin. (2014). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Adimihardja dan Hikmat. 2001. *Participatory Research Appraisal dalam Pengabdian Masyarakat*. Bandung: Humaniora Pres

Adi, Isbandi Rukminto. *Intervensi Komunitas dan Pengembang Masyarakat (Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat)*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2012.

Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Deddy. Mulyadi. (2015). *Studi Kebijakan Publik, dan Pelayanan Publik*, Bandung : Alfabeta

Fahrudin Adi. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama

Nugroho, Riant. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Singarimbun, M. 2006. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES

Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press

Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Celeban Timur UH III/54B Yogyakarta

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumodiningrat, Gunawan. (2009). *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Tachjan(2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jurnal

- Asminar. (2019). Tingkat Kesejahteraan Petani Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Desa Kuamang Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo. *Jurnal Agri Sains*. 15
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penganggulan Karang Taruna (Eka Taruna Bhakti) Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 53.
- Daraba, Dahyar. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Kabupaten Takalar. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 5. Nomor 1
- Inggriani. (2015). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Online Mahasiswa*. 3
- Nursifa. (2021). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Basi Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Inovasi Penelitian*. 2575
- Novita Setyawati, D. S. (2018). Sosialisasi Menggunakan Media Sosial Berbasis Digital. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1.
- Munawar Noor. (2010). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal ilmiah CIVIC*. 98
- Ulfa Dadan Raya. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa*. 3

Perundang-undangan

- Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur dengan Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Undang-Undang No.1, 2011. Perumahan dan Permukiman. Jakarta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

PANDUAN WAWANCARA

1. Bagaimana Pelaksanaan program Bantuan (BSPS) di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru berlangsung?
2. Bagaimana kriteria masyarakat sebagai penerima BSPS?
3. Apa saja persyaratan masyarakat sebagai penerima BSPS?
4. Apa pedoman pemerintah desa dalam melaksanakan BSPS?
5. Siapa saja yang terlibat pada pelaksanaan BSPS?
6. Bagaimana alur pemberian BSPS kepada masyarakat?
7. Bagaimana tahap seleksi pemberian BSPS?
8. Bagaimana inisiatif dan upaya masyarakat dalam melakukan swadaya?
9. Apakah masyarakat sudah mempersiapkan komitmen serta kesiapannya dalam melakukan swadaya sebagai penerima BSPS tersebut?
10. Apa saja bentuk swadaya masyarakat?
11. Bagaimana pemerintah dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat?
12. Apa saja bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh tim BSPS kepada masyarakat?
13. Apa yang dilakukan oleh tim BSPS setelah melakukan sosialisasi?
14. Apakah masyarakat mampu merencanakan kegiatan pembangunan rumah melalui bantuan tersebut?
15. Apakah aparat desa ikut membantu dalam menyiapkan persyaratan?
16. Bagaimana cara aparat desa dalam memberikan arahan ataupun sosialisasi kepada masyarakat?
17. Siapakah yang menunjuk ketua kelompok BSPS?
18. Berapa orang dalam satu kelompok?
19. Apakah masyarakat mampu untuk membangun dan mengelola pelaksanaan kegiatan?
20. Apakah masyarakat ikut serta dalam mengawasi jalannya kegiatan?
21. Bagaimana kegiatan program BSPS dilaksanakan?
22. Siapa sajakah yang terlibat dalam mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program BSPS?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

23. Berapakah evaluasi dilakukan dalam pelaksanaan program BSPS?
24. Berapakah pengawasan dilakukan oleh pendamping selama pelaksanaan program BSPS?
25. Apakah aparat desa dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan kegiatan kepada masyarakat penerima bantuan?
26. Bagaimana aparat desa dalam mempertanggungjawabkan program BSPS kepada masyarakat yang tidak menerima bantuan?
27. Apa alasan masyarakat yang telah mengajukan diri dan tidak lulus sebagai penerima BSPS?
28. Apakah masyarakat mampu melakukan pengembangan mandiri pasca kegiatan?
29. Bagaimana masyarakat dalam melakukan pengembangan inisiatif dari dana mereka sendiri?
30. Siapakah yang berhak sebagai penerima Program BSPS?
31. Bagaimana keberhasilan dari program tersebut?
32. Berapa persen pemerintah terlibat dalam pelaksanaan BSPS?
33. Apakah ada masyarakat yang menerima bantuan social ganda?

1. Bagaimana Pelaksanaan BSPS

Ada beberapa sistem pelaksanaan ketika TFL (Tim Fasilitator Lapangan) yang ditunjuk pemerintah pusat melalui Balai Perumahan yang menunjuk TFL, apa itu koordinator fasilitator terus ada lagi tenaga fasilitatornya setelah ditunjuk di SK dan diberikan surat tugas dihadapkan pada dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (tim verifikasi) yang kami punya data yang dipertimbangkan untuk dilakukan survey lapangan nanti TFL nya melakukan berbagai hal sosialisasi pertama melakukan sosialisasi program . selanjutnya identifikasi dan verifikasi lapangan terus tahapan sosialisasi sampai penentuan toko bangunan yang ditunjuk sampai dengan pencairan dana. Setelah selesai dilakukan keluarlah SK penerima bantuan yang sudah disahkan kementerian PUPR (dasar suratnya dari dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kota Pekanbaru yang sudah disetujui) atas dasar itulah mereka nanti menerbitkan rekening buku tabungan masing masing. Akan tetapi penggunaan dananya tidak bisa dipakai sesuka hati.

2. Bagaimana Kriteria Masyarakat sebagai Penerima BSPS

Kalau tidak salah BSPS ini mengacu pada PERMEN NO 7 tahun 2018 tentang bantuan stimulan perumahan swadaya syarat atau kriterianya yang paling utama adalah wni, kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, paling tinggi 15 % diatas upah minimum provinsi atau pemerintah kota (tergantung daerah masing-masing, memiliki rumah satu satunya yang ditempati (tidak boleh memiliki tanah yang lain hanya satu yang mau diperbaiki.

3. Apa Pedoman Pemerintah Kelurahan dalam Melaksanakan Program BSPS

Tim teknis itu adalah dari kelurahan itu sendiri jadi panduannya pelaksanaan kegiatan ini dari kementerian pupr berarti mengacu pada Permen no 7 tahun 2018 tentang BSPS bisa dilihat disana yang mengacu pada itu prosedur dan cara-caranya mengacu pada permen no 7 tahun 2018 tidak ada peraturan tersendiri yang orang dari RT RW dinas hanya verifikasi dan memvalidasi yang dari mereka tapi dinas yang validasi dan verifikasi apa layak diajukan sebagai penerima dan jika sudah disetujui dengan beberapa kriteria nanti upload dokumennya ke misal aplikasi intinya. Untuk jumlah tim teknisnya (tim verifikator) sendiri sudah diatur dalam permen no 7 tahun 2018 tentang BSPS. Yang pertama skpd menanggung perencanaan dan pembangunan daerah. Kemudian tim teknis yang merencanakan skpd yang menaungi perumahan terus skpd yang menaungi kecamatan, skpd kelurahan sama dengan skpd membidangi tentang pemberdayaan masyarakat.

4. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan BSPS

Yang utama adalah tim perencanaannya, SKPD nya termasuk orang kementerian yang terlibat mulai dari pengusulan, persetujuan dari kementerian terus persetujuan terus pada saat pelaksanaan terlibat pihak perbankan yang menyalurkan dana bantuan nya pihak toko bangunan menyediakan material dan masyarakat yang melakukan perbaikan rumahnya. Dan nanti diawasi semuanya tim teknisnya yang tadi saya sebutkan dan ada juga tenaga fasilitator lapangannya ada tenaga pendampingnya yang kontrak untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melaksanakan tugas dilapangan mulai dari menentukan kelompok pencairan, pelaksanaan dilapangan sampai nanti buat laporan pertanggung jawaban.

5. Bagaimana alur pemberian BSPS kepada masyarakat

Dari awal melakukan pengusulan dulu sampai nanti ditetapkan SK sebagai penerima bantuan diteken oleh SATKER provinsi dan setelah pemilik yang mendapat bantuan membuat rekening masing-masing. Nanti dibantu difasilitasi dengan tenaga fasilitator lapangan nanti setelah uangnya ditransfer dari APBN melalui menteri keuangan ke rekening penerima di bank BNI barulah nanti pelaksanaanya ini yang mengerjakan perumahannya mulai dari awal yang diperbaiki. Memiliki dua tahap pelaksanaan masyarakat yang membangun memiliki dua tahap. tahap satu nanti dianggarkan dulu apa aja yang mau dibeli misalnya pembangunan pondasi yang didampingi TFL (TIM FASILITATOR LAPANGAN) dan setelah pelaksanaanya lebih kurang tercapai 30 % dari total yang disebutkan tadi masyarakat sudah bisa membuat laporan penggunaan dana tahap 1. yang mendapat bantuan tadi bisa mengajukan lagi ke kementrian untuk mendapatkn bantuan tahap kedua. Dan setelah selesai masyarakat tadi membangun rumahnya setelah sampai selesai. Dan setelah si penerima membuat laporan pertanggung jawaban dana tahap 1 tahap 2 sampai selesai

6. Bagaimana pemerintah dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat

Sebelum kegiatan dimulai tahapan yang harus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan atau calon penerima bantuan beserta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

para aparat kelurahan disuatu tempat dikantor lurah kita lakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Salah satunya pemberdayaan ini yang tadinya masyarakat tidak tahu menjadi tahu dari program ini. Bagaimana mekanisme pelaksanaannya sampai pertanggungjawabannya seperti apa, kita lakukan terus . dan kita juga didampingi dengan tenaga pendamping masyarakat dan juga sama memberikan pemberdayaan sosialisasi pada masyarakat mulai dari tahap awal sampai akhir. Lambat laun masyarakat mandiri sudah paham pekerjaan inidanbesok dia juga mengerti dengan mekanisme tatacara awal pengusulan sampai tahap pertanggungjawaban.

7. Apa bentuk pemberdayaan yang dilakukan tim BSPS kepada masyarakat

Bentuknya dari pemerintah adalah berupa sosialisasi pemberdayaan pemahaman beserta bantek (bantuan teknis) yang merupakan salah bentuk pemberdayaan masyarakat

8. Apa yang dilakukan tim bsps setelah melakukan sosialisasi

Setelah melakukan sosialisasi dan telah diundang masyarakat penerimanya tahap selanjutnya telah melakukan sosialisasi berarti pendamping tenaga masyarakat atau fasilitator lapangan tadi yang bergerak ke rumah rumah penerima bantuan untuk dilakukan verifikasi dan validasi lapangan sampai ke tahap selanjutnya (perpanjangan tangan dari dinas kami)

9. Apakah masyarakat mampu merencanakan kegiatan pembangunan rumah melalui bantuan tersebut

Pengamalaman yang sudah dilakukan dalam 5 tahun sampai 6 tahun terakhir mampu. Walaupun ada masalah masalah kecil yang wajartapi sampai sejauh ini masih bisa diatasi

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Apa aparat kelurahan ikut membantu dalam membantu persyaratan

Iya pasti . jadi kita ada dokumen teknisnya itu ada msyarakat ada yang persyaratan dokumen itu harus dilampirkan melalui pihak kelurahan. Contohnya penerima yang sudah tua harus memiliki ahli waris agar pihak kelurahan bisa mendapatkan dokumen yang dibutuhkan.

11. Siapakah yang menunjuk ketua kelompok

Masyarakat itu sendiri misalkan dapat bantuan misalkan satu kelurahan menerima 15 dari 15 orang itu mereka itu dapat didampingi pihak pendamping tadi melakukan penunjukan siapa yang dijadikan ketua yang harapannya tadi supaya semua komunikasi satu kelompok itu ketua yang bertanggung jawab kemudia yang mampu untuk mengakomodir anggota anggota yang lain

12. Apakah masyarakat ikut mengawasi jalannya kegiatan

Kalau masyarakat mungkin secara ritel anggaran RAP masing masing mungkin tidak sampai disitu, minimal dia tahu pembangunan rumah telah selesai, kecuali pembangunan belum selesai mungkin diawasi permasalahannya itu saja.

13. Siapa sajakah yang terlibat dalam mengevaluasi dari kegiatan pelaksanaan program BPS

Dari kementrian, daerah hanya mengikut undangannya saja. Biasanya satu tahun itu rapat pertama siapa rapat kedua evaluasi mungkin 50 %rapat ketiga mungkin udah mau selesai pelaksanaan nanti terakhir evaluasi fasilitator 4 atau 5 kali yang mengevaluasi langsung orang dari pusat dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kementerian misal dirjen nya kepala balainya merek yang mengevaluasi yang memiliki tim monitoring evaluasi termasuk juga kementerian balai yang ada perwakilan di wilayah ini

14. Apakah masyarakat mampu melakukan pengembangan mandiri pascakegiatan

Iya kalau bilang mampunya 100 % belum tapi secara tahap perlahan program ini sudah lama 5 tahun atau 6 tahun. Kalau sekarang mungkin masyarakat sudah paham masalah kriteria bagaimana mendapat bantuan tetapi secara detail sekarang aturannya agak berubah. Untuk menanggapi dari tahun tahun sebelumnya kalau menurut saya masyarakat paham, mungkin tidak seluruhnya. Melakukan sosialisasi per kelurahan.

15. Apa yang menjadi alasan masyarakat yang sudah mengajukan diri dan tidak lolos menjadi penerima bantuan

Selagi masyarakat tidak memenuhi kriteria dalam pemilihan penerima bantuan sudah pasti masyarakat tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya untuk mengesahkan sebagai penerima bantuan. Meskipun hanya satu syarat yang belum terpenuhi otomatis dibatalkan. Apalagi status tanah tidak jelas .

16. Siapa yang berhak menjadi sebagai penerima bsps.

Iya Yang tadi , yang yaitu yang masuk kedalam masyarakat berpenghasilan rendah yang terdiri tingkat perekonomian masyarakat mulai dari prasejahtera ada masyarakat miskin ,sangat miskin setau saya masuk bantuan kedalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah ini kalau tidak salah termasuk desil 4 .jadi dia bukan masyarakat yang sangat sangat miskin ,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dia mampu memiliki keterbatasan jual beli makanya disini programnya adanya stimulan , harapan masyarakat itu memberikan sebagian dari uang dia hasil kerja dia tabungan atau aset dia untuk membantu menyelesaikan rumahnya.

17. Bagaimana keberhasilan dari program tersebut.

Kalau program keberhasilan ini salah tujuannya dalam rangka mengurangi bentrok perumahan, bentrok kepemilikan yang tadi sudah memiliki rumah jadi minimal programnya ini buat untuk mengurangi rumah rumah yang tidak layak huni. keberhasilan dari program tersebut dan yang paling outcome yang tadinya dia misalkan dari lantainya tanah dindingnya masih kayu apalagi punya anak yang sekolah waktu malam penerangan kurang terang harapannya kalau rumah direhap sudah bagus tingkat perekonomiannya juga semakin baik output yang terakhir yaitu malam dia kelihatan untuk membaca atau belajar menjadi terang lampunya karna udah bagus dan di cat jadi semangat dalam belajar sehingga tingkat pendidikan menjadi lebih baik.

18. Berapa persen pemerintah terlibat dalam pelaksanaan BSPS

Yang pasti saya agak ragu ,Cuma dalam rangka untuk memenuhi program program Renja Negara Kementerian PUPR kalau tidak slah bantuan pemerintah itu hanya sekitar 30 persen lebih besarnya itu di pengembang. Pengembangan itulah dalam rangka penyediaan rumah itu yang paling besar kerjanya



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19. Apakah ada masyarakat yang menerima bantuan sosial ganda

Sejauh ini kalau kita memvalidasi lapangan salah satu syarat belum program artinya kalau untuk kegiatan masyarakat yang mendapatkan program yang sama dia tidak boleh lagi mendapatkan program bantuan yang ganda . kalau dulu sudah dapat sekarang tidak dapat lagi . tapi kita tidak tahu bantuan bantuan bukan hanya dari pemerintah daerah saja kadang kadang tentara juga memiliki bantuan jadi kita tidak tahu. Kadang kadang tidak tahu selagi kita tidak dilibatkan. tapi kalau kita karna masyarakat sudah dapat dibantu salah satu syaratnya dia tidak boleh mendapatkan program dengan bantuan program yang sama .

20. Apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya ini

Program ini kan sifatnya kan stimulan . Sekarang kan harga barang material kan lgi naik tidak ada yang murah belum lagi upah tukang mahal salah satu penghambat nya itu. Kan ini kan stimulan kadang kadang masyarakat yang kita bantu ini sekalipun dia masyarakat berpenghasilan rendah sekurang kurangnya gaji dia itu ump nya kota . Setidaknya dia mempunyai swadaya dia yang masyarakat ini . Jadi penghambat nya ini tidak semua mereka mempunyai dana swadaya dari mereka walaupun sasarannya masyarakat berpenghasilan rendah. Dan dinamika untuk masyarakat yang protes karna tidak mendapat bantuan ini ada. Seperti yang tadi kita harus libatkan perangkat perangkat kelurahan desa tadi krna yang nama nya bantuan sensitif . Umpamanya kita dikasi anggaran dari pusat cuma 10 unit tau taunya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang dibutuhkan di lapangan 20 , siapa yang mau kita prioritaskan .kita pikir semuanya perlu di prioritaskan tapi kita pertimbangkan berbagai faktor karna tidak punya wilayah atau dinas di daerah maka kita libatkanlah lurah atau RT RW jadi mereka juga bisa membackup dinamika ini . Tapi insyaAllah sampai saat ini masih bisalah kita dudukkan untuk siapa yang berhak duluan. Terus yang selanjutnya penghambatnya yaitu pendataan, pendataan. Anggaran pemda ini kan semakin lama semakin kecil apalagi ada nya masa pandemi ini tentu prioritas penganggarannya diutamakan untuk kesehatan makanya perlu sebenarnya kita lakukan pendata pendataan yang dia butuh sdm dan dana gitu. Mungkin yang harus kita fokuskan kedepan bagaimana perencanaan kita ini tetap matang gitu.

DOKUMENTASI WAWANCARA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Staf Bidang Perumahan Bpk. Dendy Putra ST



Kasi Pendataan Perencanaan Perumahan Bapak Indra Syah Putra, ST

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kasi Penyediaan dan Pelaksanaan Bpk. Abraham Abdi, ST



Kasi Pendataan Perencanaan Perumahan Bapak Syah Putra, ST

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kepala Bidang Perumahan Bpk. Afrizal Zakir, ST., MT



Tampak Depan Kantor Dinas Permukiman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 1

Nomor BNBA : 2
 Nama Pemenerima Bantuan : DESI MAHYENI
 Nomor KTP : 3471094505820263
 Alamat : JL. GULAMA NO. 06 RT.002 RW.009
 Kecamatan : KPD
 Kabupaten : KPD
 Nomor Rekening : 1401464938
 Jenis Kegiatan : PKPS / PBAS *

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BSPPS TAHAP 1

Kondisi 0% (Perspektif) Kondisi Minimal 30% (Perspektif sisi sama dengan 0%)

Tampak depan Tampak belakang Perspektif sisi lain dari foto diatas

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BSPPS TAHAP 1

1. Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 1 dan Tanda Terima Bahan Bangunan Tahap 1
2. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan ke Toko/Perantara Bahan Bangunan Tahap 1
3. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap 1
4. Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Perantara Bahan Bangunan dan Hasil Survey Perjanjian Pembayaran Upah Kerja Tahap 1 (sekaligus dengan pemanfaatan bantuan)
5. Perjanjian Kerjasama Pembelian Bahan Bangunan

Ditujukan : 06-05-2020
 Disetujui : 06-05-2020
 Diverifikasi : 06-05-2020
 Tangkaran Barat, 06-05-2020
 Diketahui : 06-05-2020
 Diketahui : 06-05-2020
 Diketahui : 06-05-2020
 Diketahui : 06-05-2020

Rekomendasi oleh Tim Teknis Kota Pekanbaru
 Penerima Bantuan berhak/tidak berhak *) melakukan penarikan tahap 2
 *) sesuai yang tidak perlu

DAFTAR RENCANA PEMANFAATAN BANTUAN (DRPB) TAHAP 1

Nomor BNBA : 2
 Nama Pemenerima Bantuan : DESI MAHYENI
 Nomor KTP : 3471094505820263
 Alamat : JL. GULAMA NO. 06 RT.002 RW.009
 Kecamatan : KPD
 Kabupaten : KPD
 Nomor Rekening Penerima Bantuan : 1401464938

A. Jumlah Dana yang disalurkan ke Toko/Perantara Bahan Bangunan (Lampiran 1) (Rp)

No	Jenis Bahan Bangunan	Jumlah (Unit)	Harga Per Unit (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	1. Semen	20.00	25.000	500.000
2	2. Pasir	8.00	125.000	1.000.000
3	3. Batu	3.00	125.000	375.000
4	4. Karet	2.00	125.000	250.000
5	5. Kayu	1.00	250.000	250.000
6	6. Kayu	1.00	250.000	250.000
7	7. Kayu	1.00	250.000	250.000
8	8. Kayu	1.00	250.000	250.000
9	9. Kayu	1.00	250.000	250.000
10	10. Kayu	1.00	250.000	250.000
11	11. Kayu	1.00	250.000	250.000
12	12. Kayu	1.00	250.000	250.000
13	13. Kayu	1.00	250.000	250.000
14	14. Kayu	1.00	250.000	250.000
15	15. Kayu	1.00	250.000	250.000
16	16. Kayu	1.00	250.000	250.000
17	17. Kayu	1.00	250.000	250.000
18	18. Kayu	1.00	250.000	250.000
19	19. Kayu	1.00	250.000	250.000
20	20. Kayu	1.00	250.000	250.000
21	21. Kayu	1.00	250.000	250.000
22	22. Kayu	1.00	250.000	250.000
23	23. Kayu	1.00	250.000	250.000
24	24. Kayu	1.00	250.000	250.000
25	25. Kayu	1.00	250.000	250.000
26	26. Kayu	1.00	250.000	250.000
27	27. Kayu	1.00	250.000	250.000
28	28. Kayu	1.00	250.000	250.000
29	29. Kayu	1.00	250.000	250.000
30	30. Kayu	1.00	250.000	250.000
31	31. Kayu	1.00	250.000	250.000
32	32. Kayu	1.00	250.000	250.000
33	33. Kayu	1.00	250.000	250.000
34	34. Kayu	1.00	250.000	250.000
35	35. Kayu	1.00	250.000	250.000
36	36. Kayu	1.00	250.000	250.000
37	37. Kayu	1.00	250.000	250.000
38	38. Kayu	1.00	250.000	250.000
39	39. Kayu	1.00	250.000	250.000
40	40. Kayu	1.00	250.000	250.000
41	41. Kayu	1.00	250.000	250.000
42	42. Kayu	1.00	250.000	250.000
43	43. Kayu	1.00	250.000	250.000
44	44. Kayu	1.00	250.000	250.000
45	45. Kayu	1.00	250.000	250.000
46	46. Kayu	1.00	250.000	250.000
47	47. Kayu	1.00	250.000	250.000
48	48. Kayu	1.00	250.000	250.000
49	49. Kayu	1.00	250.000	250.000
50	50. Kayu	1.00	250.000	250.000
51	51. Kayu	1.00	250.000	250.000
52	52. Kayu	1.00	250.000	250.000
53	53. Kayu	1.00	250.000	250.000
54	54. Kayu	1.00	250.000	250.000
55	55. Kayu	1.00	250.000	250.000
56	56. Kayu	1.00	250.000	250.000
57	57. Kayu	1.00	250.000	250.000
58	58. Kayu	1.00	250.000	250.000
59	59. Kayu	1.00	250.000	250.000
60	60. Kayu	1.00	250.000	250.000
61	61. Kayu	1.00	250.000	250.000
62	62. Kayu	1.00	250.000	250.000
63	63. Kayu	1.00	250.000	250.000
64	64. Kayu	1.00	250.000	250.000
65	65. Kayu	1.00	250.000	250.000
66	66. Kayu	1.00	250.000	250.000
67	67. Kayu	1.00	250.000	250.000
68	68. Kayu	1.00	250.000	250.000
69	69. Kayu	1.00	250.000	250.000
70	70. Kayu	1.00	250.000	250.000
71	71. Kayu	1.00	250.000	250.000
72	72. Kayu	1.00	250.000	250.000
73	73. Kayu	1.00	250.000	250.000
74	74. Kayu	1.00	250.000	250.000
75	75. Kayu	1.00	250.000	250.000
76	76. Kayu	1.00	250.000	250.000
77	77. Kayu	1.00	250.000	250.000
78	78. Kayu	1.00	250.000	250.000
79	79. Kayu	1.00	250.000	250.000
80	80. Kayu	1.00	250.000	250.000
81	81. Kayu	1.00	250.000	250.000
82	82. Kayu	1.00	250.000	250.000
83	83. Kayu	1.00	250.000	250.000
84	84. Kayu	1.00	250.000	250.000
85	85. Kayu	1.00	250.000	250.000
86	86. Kayu	1.00	250.000	250.000
87	87. Kayu	1.00	250.000	250.000
88	88. Kayu	1.00	250.000	250.000
89	89. Kayu	1.00	250.000	250.000
90	90. Kayu	1.00	250.000	250.000
91	91. Kayu	1.00	250.000	250.000
92	92. Kayu	1.00	250.000	250.000
93	93. Kayu	1.00	250.000	250.000
94	94. Kayu	1.00	250.000	250.000
95	95. Kayu	1.00	250.000	250.000
96	96. Kayu	1.00	250.000	250.000
97	97. Kayu	1.00	250.000	250.000
98	98. Kayu	1.00	250.000	250.000
99	99. Kayu	1.00	250.000	250.000
100	100. Kayu	1.00	250.000	250.000
101	101. Kayu	1.00	250.000	250.000
102	102. Kayu	1.00	250.000	250.000
103	103. Kayu	1.00	250.000	250.000
104	104. Kayu	1.00	250.000	250.000
105	105. Kayu	1.00	250.000	250.000
106	106. Kayu	1.00	250.000	250.000
107	107. Kayu	1.00	250.000	250.000
108	108. Kayu	1.00	250.000	250.000
109	109. Kayu	1.00	250.000	250.000
110	110. Kayu	1.00	250.000	250.000
111	111. Kayu	1.00	250.000	250.000
112	112. Kayu	1.00	250.000	250.000
113	113. Kayu	1.00	250.000	250.000
114	114. Kayu	1.00	250.000	250.000
115	115. Kayu	1.00	250.000	250.000
116	116. Kayu	1.00	250.000	250.000
117	117. Kayu	1.00	250.000	250.000
118	118. Kayu	1.00	250.000	250.000
119	119. Kayu	1.00	250.000	250.000
120	120. Kayu	1.00	250.000	250.000
121	121. Kayu	1.00	250.000	250.000
122	122. Kayu	1.00	250.000	250.000
123	123. Kayu	1.00	250.000	250.000
124	124. Kayu	1.00	250.000	250.000
125	125. Kayu	1.00	250.000	250.000
126	126. Kayu	1.00	250.000	250.000
127	127. Kayu	1.00	250.000	250.000
128	128. Kayu	1.00	250.000	250.000
129	129. Kayu	1.00	250.000	250.000
130	130. Kayu	1.00	250.000	250.000
131	131. Kayu	1.00	250.000	250.000
132	132. Kayu	1.00	250.000	250.000
133	133. Kayu	1.00	250.000	250.000
134	134. Kayu	1.00	250.000	250.000
135	135. Kayu	1.00	250.000	250.000
136	136. Kayu	1.00	250.000	250.000
137	137. Kayu	1.00	250.000	250.000
138	138. Kayu	1.00	250.000	250.000
139	139. Kayu	1.00	250.000	250.000
140	140. Kayu	1.00	250.000	250.000
141	141. Kayu	1.00	250.000	250.000
142	142. Kayu	1.00	250.000	250.000
143	143. Kayu	1.00	250.000	250.000
144	144. Kayu	1.00	250.000	250.000
145	145. Kayu	1.00	250.000	250.000
146	146. Kayu	1.00	250.000	250.000
147	147. Kayu	1.00	250.000	250.000
148	148. Kayu	1.00	250.000	250.000
149	149. Kayu	1.00	250.000	250.000
150	150. Kayu	1.00	250.000	250.000
151	151. Kayu	1.00	250.000	250.000
152	152. Kayu	1.00	250.000	250.000
153	153. Kayu	1.00	250.000	250.000
154	154. Kayu	1.00	250.000	250.000
155	155. Kayu	1.00	250.000	250.000
156	156. Kayu	1.00	250.000	250.000
157	157. Kayu	1.00	250.000	250.000
158	158. Kayu	1.00	250.000	250.000
159	159. Kayu	1.00	250.000	250.000
160	160. Kayu	1.00	250.000	250.000
161	161. Kayu	1.00	250.000	250.000
162	162. Kayu	1.00	250.000	250.000
163	163. Kayu	1.00	250.000	250.000
164	164. Kayu	1.00	250.000	250.000
165	165. Kayu	1.00	250.000	250.000
166	166. Kayu	1.00	250.000	250.000
167	167. Kayu	1.00	250.000	250.000
168	168. Kayu	1.00	250.000	250.000
169	169. Kayu	1.00	250.000	250.000
170	170. Kayu	1.00	250.000	250.000
171	171. Kayu	1.00	250.000	250.000
172	172. Kayu	1.00	250.000	250.000
173	173. Kayu	1.00	250.000	250.000
174	174. Kayu	1.00	250.000	250.000
175	175. Kayu	1.00	250.000	250.000
176	176. Kayu	1.00	250.000	250.000
177	177. Kayu	1.00	250.000	250.000
178	178. Kayu	1.00	250.000	250.000
179	179. Kayu	1.00	250.000	250.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekretaris Desa Tangkerang Barat Ibu Adhe Ridho, S.Kom



Masyarakat yang Menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Ibu Desi

Mahyeni



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat yang Menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bapak Tawar





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4022/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 10 Agustus 2021 M
1 Muharram 1443 H

Kepada
Yth. **Candra Jon Asmsra, S.Sos, M.Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :
N a m a : ALI MUSA
NIM : 11775101392
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: **"Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru"**. Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga

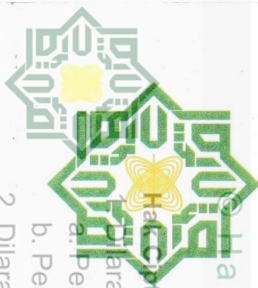
Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

UIN SUSKA RIAU

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3410/2021
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 14 Juli 2021 M
 4 Zulhijjah 1442 H

Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Ali Musa
 NIM. : 11775101392
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada
 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru"**
 Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang
 diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

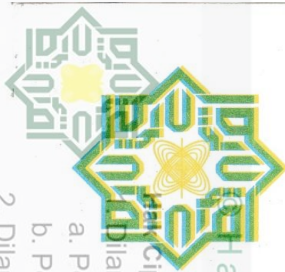


Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

: Un.04/F.VII/PP.00.9/1007/2021
: Biasa
: -
: **Pra Riset**

Pekanbaru, 9 Februari 2021 M
26 Jumadil Akhir 1442 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

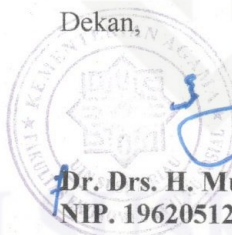
Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Ali Musa
NIM. : 11775101392
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Efektivitas Perogram Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
Untuk Kelayakan Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota PEkanbaru"** Untuk itu kami mohon kiranya
Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa
tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/642/2021



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/38962 tanggal 22 Februari 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : **ALI MUSA**
2. NIM : **11775101392**
3. Fakultas : **EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU**
4. Jurusan : **ADMINISTRASI NEGARA**
5. Jenjang : **S1**
6. Alamat : **KAMPUNG SELAMAT DESA TANJUNG BETUNG KEC. RAO SELATAN KAB. PASAMAN-SUMATERA BARAT**
7. Judul Penelitian : **EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN STIMULASI PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) UNTUK KELAYAKAN PERUMAHAN RAKYAT PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU**
8. Lokasi Penelitian : **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU**

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 24 Februari 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru

ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan

- Yth.
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOMPLEK PERKANTORAN TENAYAN RAYA GEDUNG B.9 LANTAI 3
KEC. TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU - RIAU

SURAT KETERANGAN
No. 02 /800/PERKIM/2021

Kepala Dinas Perumahan Rakysat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ALI MUSA
NIM : 11775101392
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau
Jurusan : Administrasi Negara
Universitas : UIN Suska Riau
Jenjang : S-1
Alamat : Kampung Selamat Desa Tanjung Betung Kec. Rao Selatan Kab.
Pasaman – Sumatera Barat

Adalah benar telah melaksanakan penelitian pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru dengan judul **“Efektivitas Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Kelayakan Perumahan Rakyat Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru”**.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 09 Maret 2021

An. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PEMUKIMAN
KOTA PEKANBARU
Kasubbag Umum


DUANGGA HAIRU MAULANA, S. Sos
NIP. 19730520 199403 1 007

Hak cipta Dilindungi Undang-undang

larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/42755
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.009/3410/2021 Tanggal 14 Juli 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

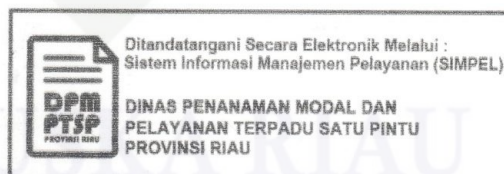
1. Nama : **ALI MUSA**
2. NIM / KTP : **11775101392**
3. Program Studi : **ADMINISTRASI NEGARA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU**
7. Lokasi Penelitian : **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 26 Juli 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/1825/2021



- Dasar** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang** :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/42755 tanggal 26 Juli 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : **ALI MUSA**
2. NIM : **11775101392**
3. Fakultas : **EKOMOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS UIN SUSKA RIAU**
4. Jurusan : **ADMINISTRASI NEGARA**
5. Jenjang : **S1**
6. Alamat : **KAMPUNG SELAMAT KEL. TANJUNG BETUNG KEC. RAO SELATAN KAB. PASAMAN-SUMATERA BARAT**
7. Judul Penelitian : **EFEKTIFITAS PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU**
8. Lokasi Penelitian : **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU**

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 28 Juli 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru

ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas UIN Suska Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOMPLEK PERKANTORAN TENAYAN RAYA GEDUNG B.9 LANTAI 3
KEC. TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU - RIAU

SURAT KETERANGAN No. 214/800/PERKIM/2021

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru dengan ini
menerangkan bahwa :

Nama : ALI MUSA
NIM : 11775101392
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas UIN SUSKA Riau
Jurusan : Administrasi Negara
Universitas : Universitas UIN SUSKA Riau
Jenjang : S-1
Alamat : Kampung Selamat Kel. Tanjung Betung Kec. Rao selatan Kab.
Pasaman - Sumatera Barat

Adalah benar telah melaksanakan penelitian pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman Kota Pekanbaru dengan judul **“Efektifitas Program Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Kota Pekanbaru”**.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pekanbaru, 10 Agustus 2021

An. KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
KOTA PEKANBARU
KasubbagUmum

DUANGGA HAIRU MAULANA, S. Sos
NIP. 19730520 199403 1 007

Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
KANTOR KELURAHAN TANGKERANG BARAT
JL. GULAMA NO. 04 RT. 02/RW. 09 PEKANBARU KODE POS 28132

SURAT KETERANGAN

Nomor : 277 / TB -XI / 2021

LURAH TANGKERANG BARAT KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU dengan ini menerangkan bahwa :

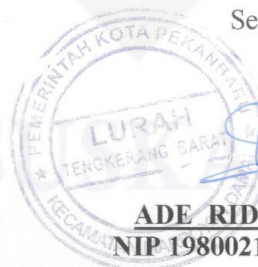
Nama Lengkap : ALI MUSA
NIM : 11775101392
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas UIN SUSKA Riau
Jurusan : Administrasi Negara
Universitas : Universitas UIN SUSKA RIAU
Jenjang : S-1
Alamat : Kampung Selamat Kel. Tanjung Betung Kec. Rao Selatan
Kab. Pasaman-Sumatera Barat

Adalah benar telah melaksanakan penelitian di Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan judul ***"ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA PEKANBARU"***

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 29 November 2021
An. LURAH TANGKERANG BARAT,
Seklur



ADE RIDHO, S.Kom
NIP 198002162002122006

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru Dilindungi Undang-undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Ali Musa lahir di Kampung Selamat 16 Juni 1998, Sumatera Barat. Anak ke- dua dari empat bersaudara, dari pasangan bapak Ferdinan dan Ibu Nursaidah Nst. Pada tahun 2011 penulis telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 05 Serasi Rao Selatan kemudian pada tahun 2014 penulis telah menyelesaikan pendidikan tingkat Madrasah Tsanawiyah Negeri di MTsN Langsung Kadap Rao dan pada tahun 2017 penulis telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Lubuk Sikaping. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau dengan mengambil Prodi Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ekonomi dan Sosial.

Adapun riwayat lain yang penulis tempuh, yaitu melakukan PKL di PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Pekanbaru. Kemudian penulis melakukan KKN-DR Plus di Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

Atas berkat dan rahmat Allah SWT serta do`a dan dukungan orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul ***“Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru”***. Berdasarkan hasil ujian munaqasah pada tanggal 22 November 2021, penulis dinyatakan “LULUS” dan dinyatakan lulus dan menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos)